

2. URUSAN KEUANGAN

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan pada tahun 2018 antara lain : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas, Dinas Perdagangan , Koperasi, UKM, Bagian Pengendalian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bagian Pngadaan Barang Dan Jasa , Sekertariat DPRD, Kecamatan Kejajar, dan Kecamatan Wadaslintang.

a. Alokasi Pendanaan

Jumlah total anggaran yang berasal dari sumber pendanaan APBD pada Urusan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2018 pada Urusan Bidang Keuangan sejumlah **Rp368.228.254.167,00** atau sebesar 17,056 % dari total APBD Tahun 2018 sebesar **Rp2.072.393.505.735,00**. Alokasi anggaran untuk urusan Keuangan dapat direalisasikan sebesar **Rp353.472.257.880,00** atau 95,99%. Program dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.E.2.1
Program dan Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang
Keuangan Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	33,717,285,901	23,629,403,118	70%
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3,630,127,072	3,140,845,571	87%
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah	2,474,200,000	2,391,982,076	97%
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22,499,935,829	13,396,425,091	60%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,902,894,000	4,572,206,907	93%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250,000,000	248,100,920	99%
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	125,000,000	113,747,830	91%
7	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	1,006,129,000	805,995,761	80%
8	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	34,000,000	34,000,000	100%

IV.E.2.Fungsi Penunjang Pemerintah_Kuangan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
B	Belanja Tidak Langsung	334,510,968,266	329,842,854,762	99%
1	Belanja Pegawai	24,304,480,266	21,308,921,762	88%
2	Belanja Hibah	16,572,600,000	15,806,635,000	95%
3	Belanja Bantuan Sosial	7,560,500,000	7,065,500,000	93%
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5,107,990,000	5,107,990,000	100%
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik	275,965,398,000	275,594,848,000	100%
6	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	4,958,960,000	99%
7	Total Belanja	368,228,254,167	353,472,257,880	96%

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo , 2018(diolah)

Dari tabel diatas alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai fungsi urusan keuangan , proporsi terbesar ada di belanja tidak langsung Rp334.510.968.266,00 atau **90,84%** dari total anggaran pada fungsi Pemerintahan urusan Keuangan sebesar **Rp368.228.254.167,00** yangdipergunakan untuk belanja Belanja Pegawai : Rp24.304.480.266,00. Belanja Hibah :Rp16.572.600.000,00. Belanja Bantuan Sosial : Rp7.560.500.000,00. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa : Rp5.107.990.000,00,- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik : Rp275.965.398.000,00,- dan Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000,00 ,- Sedangkan belanja langsung Rp33.717.285.901,00.

b. Program dan Kegiatan.

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel perlu didukung oleh beberapa faktor diantaranya, sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, pengembangan sistem informasi keuangan daerah dan penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah oleh perangkat daerah BPPKAD antara lain : Penatausahaan Pengelolaan Keuangan APBD Tahun 2018yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Penatausahaan pengelolaan keuangan Daerah guna kelancaran penatausahaan pengelolaan

keuangan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan PAD dan tergalinya potensi PAD dari sektor non PBB, Fasilitasi sistem informasi manajemen keuangan daerah, kegiatan ini bertujuan penyusunan menu tambahan dalam SPKD yaitu aplikasi untuk melaporkan inventaris barang secara tepat waktu oleh perangkat daerah.

Fasilitasi penyusunan DPA dan DPPA SKPD, kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya penyusunan DPA dan DPPA SKPD sehingga tersedianya dokumen sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Penyusunan Perubahan APBDP Tahun 2018, Kegiatan ini bertujuan terlaksananya penyusunan APBD Tahun 2018, Penyusunan APBD Tahun 2019, kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya penyusunan APBD Tahun 2019, Fasilitasi pengelolaan dana transfer, Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya dana untuk memfasilitasi administrasi transfer, Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (pPh 21), kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya penerbitan SPT PPh 21 gaji PNS. Pelaksanaan Kegiatan MP TP-TGR, kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya kegiatan MP TP –TGR.

Pencetakan dan Pengadaan blangko SPPT/ DHKP dan TTSDPH, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan PBB. Pendataan massal, pemutahiran dan penilaian individu PBB P-2, kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya data wajib pajak PBB. Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah (PAD), Kegiatan ini bertujuan untuk diperolehnya data PAD. Optimalisasi pengelolaan pendapatan PBB, kegiatan ini bertujuan untuk optimalnya PAD dari sektor PBB. Sosialisasi dan penyampaian SPPT PBB dan DHKP, kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya penyampaian SPPT PBB dan DHKP. Optimalisasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PBB, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya / tergalinnya potensi PAD dari sektor PBB dan BPHTB. Fasilitasi gaji outsourcing PBB P-2, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja tenaga outsourcing guna meningkatkan ketertiban administrasi dan pengelolaan PBB P-2.

Implementasi transaksi non tunai, kegiatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektif, transparansi dan akuntabilitas keuangan. Implementasi host to host pendapatan daerah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data pendapatan daerah. Pengadaan aplikasi pembayaran PBB Host to host, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pembayaran PBB. Optimalisasi monitoring surat pertanggungjawaban SKPD, kegiatan ini bertujuan untuk tertib administrasi keuangan SKPD. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah juga dilaksanakan oleh perangkat daerah selain BPPKAD yaitu Kegiatan Penyusunan analisa standar belanja dan Penyusunan standar satuan harga yang dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan Setda dan pada kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM, kegiatan Penyelesaian Tunggakan Dana Daerah yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD, dan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Kejajar.

2) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini antara lain : Operasional sekretariat DBHCHT, Fasilitas pembinaan BPR/BKK, Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD yang dilaksanakan pada PD Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonosobo, Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan pada PD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Wonosobo. Optimalisasi Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA), Fasilitas Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Anggaran Non APBD Kabupaten, Monitoring Pembangunan, Pembinaan Jasa Konstruksi, Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan Fasilitas RUP yang dilaksanakan pada OPD Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Wonosobo .

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan program pada urusan Keuangan maka perlu adanya kegiatan antara lain: Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, , Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, , Penyediaan Makanan dan Minuman, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan dan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan pendukung utama kelancaran pelaksanaan program pada Urusan Keuangan , diantaranya melalui kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, pengadaan Kendaraan dinas/ operasional, kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa pengadaan kendaraan roda empat sebanyak 12 unit, kendaraan roda duasebanyak 437 unit sebagai pemenang lelang adalah PT Nasmoco Wonosobo dan PT Astra Internasional HSO. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor berupa pengadaan komputer, laptop, AC Ruang Rapat, Audio Ruang Rapat, kursi rapat 60 unit dan meja rapat 6 unit .Kegiatan pendukung lainnya adalah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terpenuhi kebutuhan aparatur pengelola keuangan yang handal dapat terpenuhi. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan STIKOM Bandung.

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah :Penyusunan Laporan PertanggungjawabanKeuangan Daerah yang bertujuan untk terlaksananya penyusunan pertanggungjawaban APBD guna meningkatkan kelancaran pengelolaan Keuangan Daerah.

7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah

Kegiatan penunjang program ini berupa: Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tujuan untuk terlaksananya proses penghapusan BMD agar meningkatkan tertib administrasi BMD terwujud. Pengadaan Plang Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk terlaksananya pengadaan papan nama tanah milik daerah guna meningkatkan tertib administrasi BMD/ aset daerah ,Sensus Barang Milik Daerah, yang bertujuan untuk tersedianya data inventarisasi BMD yang valid. Workshop Pengurus Barang Milik Daerah yang bertujuan terlaksananya workshop pengurus BMD dan Integrasi Aplikasi Persediaan yang bertujuan untuk tersedianya data persediaan.

8) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan penunjang program ini berupa kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa yang dilaksanakan OPD Kecamatan Kejajar dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa yang dilaksanakan pada OPD Kecamatan Wadaslintang.

c. Capaian Kinerja

Realisasi Kinerja yang telah dilaksanakan tergambar dalam tingkatan pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan yaitu terlihat pada tabel Realisasi Target Indikator Program dibawah ini :

Tabel IV.E.2.2

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	% Capaian 2018	Simbol Status Capaian	
1	Opini BPK	Opiini BPK	WTP	WTP	Dalam Proses			WTP
2	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	90	100	90	90%	◇	100
3	Predikat SAKIP	Nilai sakip			B	100	0	B
4	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	%	100	85	100	117,64	0	93
5	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100%	0	100
6	%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005	%	100	100	90	90%	◇	100
7	% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%	100	100	90	90%	◇	100
8	% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.		85	80	80	100%	0	100
9	Persentase kenaikan PAD	%	10,95	5	6.99	140%	0	5
10	Rasio realisasi PAD	Rasio	106	100	106.94	107%	0	100
11	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	%	43,90	Menurun	39.01	Menurun	0	Menurun
12	Persentase Realisasi Belanja Modal	%	64,39	0.85	77.33	9098%	0	99

IV.E.2.Fungsi Penunjang Pemerintah_Kuangan

NO	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	% Capaian 2018	Simbol Status Capaian	
13	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur	%	94,82	100	82.8	83%	◇	100
14	Persentase belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	%	17,93	Meningkat	23.8	Meningkat	0	Meningkat
15	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja	%	19,21	Meningkat	22.2	Meningkat	0	Meningkat
16	Persentase realisasi belanja barang dan jasa	%	90,10	90	93.03	103%	0	95
17	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Rasio	13,04	15.31	11.7	76%	●●●	20
18	Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah	Rasio	15,30	971028	14.97	0%	△△△△	5
19	Persentase peningkatan BUMD Berkinerja baik	%	70	70	70	100%	0	80
20	Persentase Kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD	%	11,25	7.44	6.63	89%	◇	8,39
21	Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU)	%	78,29	100	100	100%	0	100
22	Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran	%	80,00	100	82.11	82%	◇	100
23	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur	%	97,32	100	82.63	83%	◇	100
24	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	%	80,00	80	80	100%	0	85
25	Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur	%	91,45	99	96.09	97%	◇	99

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2018 (diolah)

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq$ 100 %
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $\geq$ 80%- 99,99%
●●●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>$ 40% dan $<$ 80%
△△△△	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq$ 40%

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penyelenggaraan fungsi keuangan antara lain:

Tabel IV.E.2.3**Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**

NO	Permasalahan	Solusi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, hal ini disebabkan oleh pembayaran pajak dan retribusi tidak lancar akibat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dan Retribusi masih rendah, petugas pungut tidak langsung setor Kas daerah, masih ada komponen-komponen pajak dan retribusi yang belum tergali potensinya serta pengelolaan potensi PAD yang belum optimal.	- Modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah (aplikasi online) - Penyempurnaan landasan hukum dan mengevaluasi regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi - Mengadakan sosialisasi peraturan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah - Mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang potensial - Mengoptimalkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah
2	Efisiensi dan efektivitas belanja SKPD dalam pelaksanaan APBD belum optimal	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan penyerapan anggaran secara berkala kepada semua perangkat daerah
3	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD masih di bawah 100% penyebabnya antara lain Kurangnya jumlah SDM pengelola keuangan daerah,	Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang memadai dan berkualitas